

# INKLUSI DISABILITAS

## Program INKLUSI dalam Memajukan Inklusi Disabilitas

Des 2024



**INKLUSI** bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memajukan kesetaraan gender, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Sebagai bagian dari pendekatan interseksionalitas, program ini secara khusus menyoroti penyandang disabilitas yang menghadapi berbagai lapisan kerentanan. Mendukung agenda pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), **INKLUSI mendorong kebijakan dan inisiatif yang memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan terutama dalam 4 fokus isu**, yaitu meningkatkan akses layanan dasar, perlindungan dari kekerasan, pemulihan ekonomi dan penghidupan yang layak, serta partisipasi aktif dalam pembangunan.

### 1. Meningkatkan Akses Layanan Dasar



Penyandang disabilitas mengakses layanan dasar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Maros.  
Photo: INKLUSI Sekretariat

### Strategi Mitra INKLUSI:



#### Peningkatan Kualitas Data

Bekerja sama dengan pemerintah terkait untuk memperbarui dan melanjutkan pendataan berbasis komunitas atau desa guna memastikan kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan akses layanan dasar.



#### Pengembangan Layanan Berbasis Komunitas

Mengembangkan program-program berbasis komunitas untuk memperluas akses layanan dasar bagi kelompok marginal dan penyandang disabilitas, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial.



#### Peningkatan Kapasitas Kader Desa

Melatih kader dan fasilitator desa, termasuk anak muda dengan disabilitas, untuk terlibat aktif dalam advokasi dan pendampingan kelompok marginal.



### Dukungan Kebijakan Inklusif

Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD), mendukung optimalisasi implementasi RAN-PD di tingkat nasional, dan kebijakan daerah lainnya untuk mewujudkan inklusi disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas



### Pendampingan dan Pelatihan Penyedia Layanan

Melakukan pendampingan dan pelatihan bagi penyedia layanan (Sekolah, Puskesmas, KUA, dll.) untuk memberikan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Termasuk promosi pendidikan inklusif melalui peningkatan kapasitas di lembaga pendidikan dan ULD Pendidikan, program percontohan, dan kolaborasi internasional.



### Advokasi, Kampanye, dan Edukasi Publik

Mengadakan kampanye dan edukasi publik untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap kelompok difabel serta meningkatkan kesadaran kelompok difabel dan keluarganya dalam mengakses layanan dasar.

## Capaian Program INKLUSI



### Terbentuknya Kelompok Berbasis Komunitas

#### > 265 kelompok

di tingkat komunitas terbentuk untuk mendukung kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas sebagai ruang untuk melaporkan tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan dasar.

- Pos Pengaduan Sekolah Perempuan (KAPAL Perempuan)
- Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK-PEKKA)
- Kelompok Desa Peduli Buruh Migran/ DESBUMI (Migrant CARE)
- Balai Syakinah (BSA) ('Aisyiyah)
- Kelompok Difabel Desa/Kelurahan (SIGAB)
- Self-Help Group (PR YAKKUM)
- Kelompok Konstituen (BaKTI)
- Sekolah Lapang Inklusif (Kemitraan)



### Peningkatan Kualitas Data

**PR YAKKUM dan UKDW** - adanya data kebutuhan Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) dan situasi eksklusi sosial di tingkat desa yang kemudian digunakan para kepada desa dalam menyusun perencanaan desa.

**KAPAL Perempuan** - adanya data desa terkait ketimpangan gender, disabilitas, dan inklusi sosial melalui proses *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang kemudian digunakan para kepada desa dalam menyusun perencanaan desa.



### Peningkatan Akses Layanan Dasar

**5.350** orang marginal\*

(7% penyandang disabilitas) menerima dukungan untuk akses layanan dasar dan perlindungan sosial.

**22.261** orang marginal\*

(8% penyandang disabilitas) mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dokumen legal, dan program perlindungan sosial.

PR YAKKUM dan SIGAB bekerja sama dengan rumah layanan sosial/panti dan Puskesmas untuk memberikan perawatan medis, rehabilitasi, dan dukungan sosial bagi penyandang disabilitas termasuk psikososial.

Adanya beragam inisiatif mendorong pendidikan inklusif:

- Yayasan BaKTI adanya prototipe Sekolah Inklusi di Kota Kendari dan Kabupaten Maros.
- PR YAKKUM dan Australia Awards Indonesia berkolaborasi membuka kesempatan meneruskan S2 di Australia bagi penyandang disabilitas.
- 'Aisyiyah adanya peningkatan kapasitas tenaga pengajar dan inklusivitas fisik sekolah di bawah naungan Muhammadiyah.



## Mendukung Terbitnya Kebijakan Inklusif

**Daerah:** Terbitnya kebijakan terkait layanan pendidikan inklusif, kesehatan inklusif, gizi, stunting, RAD-PD, RAD SDG, dan kebijakan inklusif lainnya di sejumlah provinsi dan kabupaten di antaranya Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Kalimantan Tim, DI Yogyakarta, Papua Barat Daya, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

**Nasional:** Partisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK), Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas, mengikuti uji coba Layanan Lansia Terintegrasi, dan memberikan masukan dalam RPJMN kesehatan ibu dan anak.



## 2. Perlindungan dari Kekerasan



Sekolah Perempuan berkampanye pada 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.  
Photo: INKLUSI Secretariat.

### Strategi Mitra INKLUSI:



#### Menggagas dan mengoptimalkan mekanisme Rujukan Kasus Kekerasan

Berkolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait untuk menggagas dan meningkatkan efektivitas mekanisme rujukan kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas.



#### **Mendampingi Penyusunan Kebijakan Perlindungan dari kekerasan**

Mitra INKLUSI memperluas koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga terkait, serta mendampingi pemerintah, penyedia layanan, lembaga adat, dan instansi terkait dalam penyusunan atau revisi kebijakan yang mendukung perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan kelompok marginal.



#### **Membentuk dan menguatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)**

KAPAL Perempuan, Yayasan BaKTI, dan 'Aisyiyah mendukung pembentukan dan penguatan UPTD PPA agar berfungsi dengan baik dan memiliki perspektif perlindungan korban dengan disabilitas.



#### **Menguatkan Kapasitas Pihak Terkait dalam Pencegahan dan Perlindungan dari Kekerasan**

Penguatan kapasitas paralegal komunitas, pendamping komunitas, penyuluh perkawinan, dalam melakukan advokasi untuk perlindungan terhadap kekerasan, melakukan pendampingan pencegahan dan penanganan perkawinan anak, melalui pendidik sebaya dan bekerja sama dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di tingkat Universitas.



#### **Mendorong relasi sosial untuk pencegahan kekerasan**

PR YAKKUM, PKBI, dan PERMAMPU, melakukan upaya untuk meningkatkan relasi sosial dalam keluarga dan komunitas guna mencegah kekerasan terhadap kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas.



#### **Meningkatkan kesadaran publik terkait pencegahan kekerasan**

Melakukan kampanye publik termasuk melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencegahan kekerasan khususnya bagi perempuan, kelompok difabel, dan kelompok marginal lainnya.

## Capaian Program INKLUSI



### **Pembentukan dan Penguatan Kelompok Komunitas**

#### **Terbentuknya 265 kelompok komunitas baru**

yang memperluas akses layanan perlindungan dari kekerasan:

- > 1.870 orang marginal termasuk kelompok disabilitas mengakses layanan perlindungan kekerasan.
- Pos Pengaduan/Layanan Berbasis Komunitas (LBK) di tingkat desa (BaKTI dan KAPAL Perempuan).
- Pelatihan Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan (KAPAL Perempuan).
- PERMAMPU merevitalisasi layanan OSS&L di Puskesmas melalui pembaruan MoU.



### **Mendukung Terbitnya dan Implementasi Kebijakan dan Program**

- Partisipasi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan nasional dan daerah, termasuk Perpres, Peraturan Menteri, dan Perdes, yang memperkuat perlindungan kelompok marginal dan penyandang disabilitas dari kekerasan. Antara lain, rancangan PP/Perpres UU TPKS, Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, pencegahan perkawinan anak, serta Kertas Kerja Ruang Keadilan dan Jaminan Perlindungan Perempuan Adat dari Kekerasan Seksual.
- Adanya MoU dengan 2 Puskesmas di Bengkulu dan Lampung untuk pengelolaan Pusat Layanan dan Pembelajaran HKSR (OSS&L)
- Pelaksanaan inisiatif Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di 14 desa, dengan capaian 7 indikator, serta pembahasan Perdes dan Perbup DRPPA di Lombok Timur dan Gresik.

- Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di 7 kabupaten/kota untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas.
- Adanya sosialisasi dan pelatihan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) di Aceh, dukungan penyusunan Panduan Praktis STRANAS PPA, serta joint monitoring di Sulawesi Selatan.
- Terlaksana pengembangan mekanisme rujukan kasus kekerasan, termasuk untuk penyandang disabilitas, melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
- Penguatan Satgas PPKS di Universitas Hasanuddin, termasuk penyusunan SOP dan peningkatan kapasitas penanganan kekerasan seksual.

### 3. Pemulihan ekonomi dan mata pencaharian



Pertemuan Forum Disabilitas di Desa Hukurila Kota Ambon Maluku.  
Foto: Sekretariat INKLUSI

#### Strategi Mitra INKLUSI:

Mitra INKLUSI meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di bidang ekonomi dan kewirausahaan melalui berbagai pendekatan:



##### **Penguatan Kelompok Usaha Berbasis Komunitas**

Membentuk dan mendampingi kelompok usaha berbasis komunitas, termasuk penyandang disabilitas, agar kuat secara kelembagaan dan efektif dalam memberikan manfaat ekonomi.



##### **Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Ekonomi**

Memberikan pendampingan, pelatihan, dan pemetaan potensi kepada individu atau kelompok difabel untuk memperkuat kapasitas ekonomi melalui program keterampilan dan kewirausahaan.



##### **Pengembangan dan Pendampingan Pelaku UMKM atau Usaha Kelompok (Koperasi)**

- Membentuk koperasi ekonomi yang dikelola oleh perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.
- Mendampingi kelompok usaha, UMKM, atau koperasi kelompok difabel agar beroperasi efektif, dengan peningkatan anggota, kemampuan manajerial, jejaring pasar, dan akses ke program pengembangan usaha serta pendanaan pemerintah.



##### **Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan dan Sektor Swasta**

- Menguatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan dinas terkait untuk mengimplementasikan program pemerintah yang mendukung kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas.
- Berkolaborasi dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya untuk membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui program pemagangan dan perekrutan sesuai kemampuan mereka.



### Optimalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan

Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk membentuk dan mengoptimalkan ULD yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan pemberi kerja, mendapatkan pelatihan, dan peluang kerja.

## Capaian Program INKLUSI



### Dibentuk dan Dikembangkan Kelompok Ekonomi

**>180 kelompok ekonomi berbasis komunitas dibentuk, melibatkan >4.120 orang marginal.**

Kelompok-kelompok ini meliputi Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA), kelompok tani, kelompok nelayan, koperasi produsen, koperasi dan kelompok usaha Sekolah Perempuan, kelompok usaha PEKKA, koperasi Purna Migran, Credit Union Perempuan, dan lain-lain.

- **Kelompok Simpan Sekolah Perempuan oleh KAPAL Perempuan** memberikan pinjaman kepada 862 perempuan marginal.
- **KEMITRAAN** membentuk Koperasi Lampion Merah yang mengelola dana 94 juta dengan >100 anggota perempuan termasuk penyandang disabilitas.
- **Dukungan pemerintah daerah kepada kelompok ekonomi** mulai menerima pelatihan, dukungan teknis, dan pendanaan dari pemerintah, seperti bantuan lahan, green house, dan modal usaha.
- **Mitra INKLUSI menyelenggarakan lokakarya ketenagakerjaan** yang menghasilkan pembentukan kelompok kerja, termasuk Training of Trainers bagi pemerhati kesiapan kerja orang muda disabilitas.



### Optimalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan

Yayasan BaKTI dan SIGAB membentuk dan mengoptimalkan ULD di berbagai daerah, termasuk Ambon, Maros, Lombok, Situbondo, Probolinggo, Kulonprogo, Sleman, dan yang lainnya, untuk membuka akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.



### Adanya Kemitraan dengan Pihak Swasta dan Universitas

Mitra INKLUSI bekerja sama dengan perusahaan seperti Novotel Makassar, Alfamart, PT Adira Finance, serta universitas untuk membuka kesempatan kerja dan pemagangan bagi penyandang disabilitas. Beberapa anggota kelompok penyandang disabilitas telah mendapatkan pekerjaan melalui kemitraan ini.



### Penelitian dan Pembangunan Pengetahuan

- **Universitas Airlangga dan 'Aisyiyah** melakukan penelitian mengenai kontribusi perempuan di sektor pertanian dan tantangan yang dihadapi.
- **KAPAL Perempuan dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga** berkolaborasi dalam kuliah tamu tentang perempuan dan pembangunan ekonomi.



### Adanya Inovasi dalam Pemberdayaan Ekonomi

- **Akademi Paradigta (PEKKA):** Kursus kewirausahaan yang meningkatkan kapasitas >660 pemimpin perempuan di 27 kabupaten/kota.
- **Pasar Barter (PEKKA di Lembata, NTT):** Pasar yang menerapkan proses saling tukar produk hasil produksi kelompok.
- **Sekolah Tani, Sekolah Nelayan, Sekolah Wirausaha 'Aisyiyah:** Melibatkan >330 anggota
- **Peningkatan keterampilan menenun** sebagai sumber penghasilan perempuan, dan salah satu cara untuk mencegah perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan di Lombok Utara.
- **Pemanfaatan hasil pertanian dan perikanan** sebagai dukungan program pencegahan stunting di desa dan ketahanan pangan keluarga.

## 4. Partisipasi Inklusif dalam Pembangunan



Pertemuan Kelompok Disabilitas Desa (KDD) di Nusa Tenggara Timur.  
Photo: INKLUSI Sekretariat.

### Strategi Mitra INKLUSI:



#### Penguatan Kepemimpinan dan Keterampilan Kelompok

Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas, untuk meningkatkan kepemimpinan dan keterampilan mereka dalam berpartisipasi dalam kelembagaan dan proses pengambilan keputusan.



#### Fasilitasi Kegiatan dan Pembentukan Kelompok

Memfasilitasi keterlibatan kelompok marginal dalam proses pembangunan, seperti musrenbang dan penyusunan RPJPD/RPJMD, melalui pembentukan dan dukungan kelompok seperti Kelompok Disabilitas Desa (KDD), Sekolah Perempuan, dan Pusat Pelayanan Terpadu DESBUMI.



#### Advokasi dan Lobi kepada Pemangku Kepentingan

Melakukan advokasi pada pemerintah untuk pemenuhan hak kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas, serta terlibat dalam penyusunan dan penerbitan regulasi (Perdes, Perda, Rencana Aksi Daerah) melalui proses partisipatif.



#### Koordinasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Membentuk dan memperkuat kemitraan dengan PEMDA, sektor swasta, pemerintah desa, dan OMS untuk memastikan partisipasi kelompok marginal dalam program pembangunan dan pemenuhan hak mereka.

### Capaian Program INKLUSI



#### Penguatan Kapasitas dalam Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan Publik

- **>1.900 orang marginal**, termasuk penyandang disabilitas menerima pelatihan dasar dalam cara berpartisipasi politik seperti mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) dan berpartisipasi aktif dalam Musrebang.
- **>1.600 orang marginal**, termasuk 280 penyandang disabilitas, berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan publik dan proses perencanaan pembangunan.
- **>4.420 perempuan, termasuk penyandang disabilitas**, berpartisipasi dalam Musyawarah Perempuan Nasional. Mitra INKLUSI bekerja sama dengan KPPPA dan Bappenas merumuskan 9 isu fokus GEDSI, termasuk inklusi disabilitas, untuk RPJMN dan RPJMD di daerah terpilih. Proses ini melibatkan penyandang disabilitas untuk masukan terkait kebijakan inklusif dan layanan aksesibel.



## Peningkatan Suara dan Pengaruh Penyandang Disabilitas

- Kemitraan mendorong berbagai forum seperti Forum Perempuan, Forum Disabilitas, dan Sub-mitra di 36 desa untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Dusun/Desa dan Musrembangdes.
- SIGAB melibatkan 200 penyandang disabilitas dalam penyusunan peraturan desa di 19 desa dan 22 difabel dalam penguatan kapasitas untuk pemberdayaan politik.
- Yayasan BaKTI mendorong reses partisipatif dan penganggaran desa untuk pendidikan dan peningkatan keterampilan penyandang disabilitas di berbagai wilayah.



## Inovasi untuk Mendukung Partisipasi Penyandang Disabilitas

- Pembentukan Komisi Daerah Disabilitas untuk mengawasi pelaksanaan program inklusif di Kabupaten Maros.
- Pembentukan Kelompok Disabilitas Desa/Kelurahan (KDD/KDK) untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di tingkat desa/kelurahan di wilayah Ambon, Maros, Sumba, Balikpapan, dan lainnya.
- Pembentukan Forum Disabilitas di berbagai daerah untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas dan partisipasi dalam pembangunan inklusif.
- PR YAKKUM membentuk *Self Help Group* (SHG) untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pembangunan.
- 'Aisyiyah membangun Forum Pra Musyawarah Desa untuk melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam menyampaikan aspirasi pembangunan.



## Dukungan Mitra untuk Perencanaan Pemerintah Inklusif

- Yayasan BaKTI dan SIGAB mendorong penyusunan regulasi Desa Inklusi untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- Aisyiyah, Migrant CARE, PR PR YAKKUM, KAPAL Perempuan, SIGAB, PERMAMPU, dan Yayasan BaKTI memantau partisipasi kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, dalam pemilu.
- Pendampingan penyusunan dan penerbitan kebijakan inklusif di berbagai wilayah kerja SIGAB, PR YAKKUM, Yayasan BaKTI, KEMITRAAN, PEKKA, Migrant CARE, dan PERMAMPU



## Adanya Penelitian untuk Meningkatkan Partisipasi Kelompok Difabel

- Akatiga-UNPAR melakukan penelitian tentang peran pemuda dalam pengambilan keputusan di komunitas.
- FISIPOL UGM melakukan analisis GEDSI tingkat kabupaten dan penelitian kebijakan inklusif di berbagai daerah.
- 'Aisyiyah mendokumentasikan praktik baik dalam mendorong perdes isu GEDSI di wilayah kerjanya.
- PKMK (CHPM) UGM menghasilkan riset untuk mendorong layanan kesehatan yang inklusif di Indonesia, mencakup tata kelola, program khusus bagi penyandang disabilitas, fasilitas yang ramah penyandang disabilitas, serta skema pembiayaan yang inklusif.

## NO-ONE IS LEFT BEHIND

*Tidak Ada Satupun yang Tertinggal*

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif, atau INKLUSI, berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 5 tahun (dengan anggaran mencapai A\$75 juta sepanjang 2021-2026) dengan kemungkinan perpanjangan 3 tahun hingga A\$45 juta (2026-2029). Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, >120 kabupaten, dan >800 desa di Indonesia.

